

Strategi Penegakan Hukum dan Disiplin Prajurit TNI AD dalam Operasi Pengamanan Perbatasan Papua – PNG Guna Mewujudkan Prajurit Profesional

Gorga Alam Harahap¹ Hipdizah² Novky Asmoro³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: gorga.harahap@gmail.com¹

Abstract

Penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI AD dalam operasi pengamanan perbatasan Papua–PNG merupakan aspek penting untuk menjamin keberhasilan tugas dan menjaga profesionalisme prajurit di wilayah dengan kompleksitas ancaman tinggi, mulai dari aktivitas kelompok separatis bersenjata hingga dinamika sosial masyarakat perbatasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI AD dalam operasi Pamtas Papua–PNG serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan langkah optimalisasi guna memperkuat profesionalisme prajurit. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dan disiplin telah dilaksanakan melalui mekanisme komando, pengawasan melekat, dan penerapan hukum militer, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana pembinaan hukum, ketimpangan pemahaman aturan, tekanan situasional, serta kondisi geografis dan infrastruktur komunikasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pembinaan hukum, penguatan pengawasan, penyempurnaan mekanisme operasional, dan adaptasi doktrin.

Keywords: Penegakan Hukum, Disiplin Prajurit, TNI AD, Operasi Pengamanan Perbatasan, Papua–PNG, Profesionalisme Prajurit



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Perkembangan operasi militer modern menunjukkan adanya peningkatan tuntutan terhadap akuntabilitas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum nasional dan hukum humaniter internasional. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum dan disiplin prajurit menjadi aspek fundamental dalam keberhasilan pelaksanaan operasi militer, khususnya pada operasi pengamanan wilayah perbatasan yang memiliki kompleksitas ancaman tinggi. Wilayah perbatasan Papua–Papua New Guinea (PNG) merupakan kawasan strategis yang menghadirkan dinamika keamanan, sosial, dan ekonomi yang beragam, sehingga menuntut prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk mampu menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan berlandaskan hukum. Kajian literatur menunjukkan bahwa profesionalisme militer sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem penegakan hukum dan disiplin internal. Penelitian-penelitian dalam satu dekade terakhir menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum, kepemimpinan komando, serta mekanisme pengawasan menjadi faktor utama dalam menjaga kredibilitas institusi militer di wilayah operasi yang kompleks. Studi terkait operasi perbatasan juga menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin prajurit tidak hanya berdampak pada individu, tetapi dapat memengaruhi legitimasi misi, hubungan dengan masyarakat, dan citra negara secara internasional. Selain itu, pendekatan strategi yang menyeimbangkan tujuan, cara, dan sumber daya menjadi kerangka penting dalam merancang sistem penegakan disiplin yang efektif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas profesionalisme militer, disiplin prajurit, dan strategi operasi perbatasan, sebagian besar masih berfokus pada aspek operasional keamanan atau kepemimpinan secara umum. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan

strategi penegakan hukum dan disiplin sebagai instrumen utama dalam mewujudkan profesionalisme prajurit pada operasi pengamanan perbatasan Papua–PNG masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji faktor pendukung, hambatan kontekstual di lapangan, serta langkah optimalisasi strategi penegakan hukum secara komprehensif dalam kerangka operasi militer selain perang. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa kebutuhan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana strategi penegakan hukum dan disiplin diterapkan secara nyata dalam operasi pengamanan perbatasan, bagaimana faktor lingkungan operasi memengaruhi efektivitasnya, serta bagaimana strategi tersebut dapat dioptimalkan untuk memperkuat profesionalisme prajurit. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif strategi militer, penegakan hukum militer, dan faktor kontekstual lapangan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI AD dalam operasi pengamanan perbatasan Papua–PNG, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan langkah optimalisasi strategi guna mewujudkan profesionalisme prajurit secara berkelanjutan.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI Angkatan Darat dalam operasi pengamanan perbatasan Papua–Papua New Guinea (PNG) dalam konteks alami dan operasional. Desain studi kasus digunakan untuk memfokuskan analisis pada satuan tugas pengamanan perbatasan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif terkait strategi, mekanisme pelaksanaan, serta faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan disiplin.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini dilaksanakan pada satuan tugas pengamanan perbatasan TNI AD di wilayah perbatasan Papua–PNG. Hasil penelitian menunjukkan kondisi nyata penegakan hukum dan disiplin prajurit dalam pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa penegakan hukum dan disiplin dilaksanakan melalui mekanisme komando, pengawasan melekat, serta penerapan prosedur hukum militer. Pelaksanaan pembinaan hukum dilakukan sebelum penugasan dan selama operasi berlangsung melalui penyuluhan hukum dan pengarahan komandan. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari komandan satuan tugas hingga komandan pos. Observasi menunjukkan adanya faktor lingkungan operasi yang memengaruhi pelaksanaan disiplin, yaitu keterisolasian wilayah, keterbatasan komunikasi, dan tekanan operasional yang tinggi. Kondisi geografis yang sulit berdampak pada keterbatasan pengawasan langsung serta proses pembinaan yang tidak merata. Wawancara dengan informan memperlihatkan bahwa kepemimpinan komandan menjadi faktor dominan dalam menjaga disiplin prajurit. Satuan dengan kepemimpinan yang konsisten menunjukkan tingkat pelanggaran yang lebih rendah. Selain itu, kesejahteraan prajurit, ketersediaan logistik, dan fasilitas komunikasi berhubungan dengan kepatuhan terhadap aturan. Studi dokumentasi menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin yang terjadi berada pada kategori pelanggaran ringan hingga sedang, yang berkaitan dengan prosedur operasional, interaksi dengan masyarakat, dan pelaksanaan tugas di lapangan. Mekanisme penanganan pelanggaran dilaksanakan melalui jalur disiplin internal dan jalur hukum militer.

Table 1. Kondisi Moril Prajurit Sebelum dan Sesudah Kegiatan Musik

No	Aspek	Temuan
1	Mekanisme penegakan	Dilaksanakan melalui komando, pengawasan melekat dan hukum militer
2	Pembinaan Hukum	Dilaksanakan sebelum dan selama operasi
3	Faktor Lingkungan	Wilayah terpencil, keterbatasan komunikasi, tekanan operasi
4	Kepemimpinan	Berpengaruh langsung terhadap Tingkat disiplin
5	Jenis Pelanggaran	Dominan pelanggaran ringan dan prosedural

Data pada tabel menunjukkan bahwa penegakan hukum dan disiplin berjalan secara sistematis namun dipengaruhi oleh faktor kontekstual di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum dan disiplin terdiri dari pendekatan preventif, preemtif, dan represif yang diterapkan secara berjenjang dalam struktur komando..

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dan disiplin prajurit dalam operasi pengamanan perbatasan merupakan proses sistemik yang melibatkan aspek kepemimpinan, pembinaan hukum, pengawasan, dan faktor lingkungan operasi. Data yang diperoleh telah diolah melalui kategorisasi tematik sehingga menghasilkan temuan utama berupa pola implementasi strategi penegakan disiplin di wilayah operasi. Dari perspektif konsep strategi militer, temuan menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan operasi, cara pelaksanaan penegakan hukum, dan sumber daya yang tersedia. Implementasi strategi preventif melalui pembekalan hukum dan pembinaan mental memperkuat kesadaran hukum prajurit. Strategi preemtif melalui pengawasan melekat memungkinkan deteksi dini potensi pelanggaran. Sementara itu, strategi represif memastikan adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Faktor lingkungan operasi menjadi variabel penting yang menjelaskan mengapa pelaksanaan disiplin tidak selalu konsisten. Kondisi geografis yang terpencil, keterbatasan komunikasi, serta tekanan psikologis operasi memengaruhi stabilitas perilaku prajurit. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kondisi operasional dan faktor manusia.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa profesionalisme militer dipengaruhi oleh kepemimpinan, sistem pengawasan, dan pembinaan hukum. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan perbedaan pada penekanan faktor kontekstual wilayah operasi perbatasan sebagai variabel yang signifikan dalam efektivitas penegakan disiplin. Dengan demikian, temuan penelitian memperkuat argumentasi bahwa strategi penegakan hukum di wilayah operasi terpencil harus bersifat adaptif. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa integrasi perspektif strategi militer, penegakan hukum militer, dan faktor lingkungan operasi dalam menjelaskan profesionalisme prajurit. Secara praktis, temuan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pembinaan hukum, penguatan kepemimpinan adaptif, serta dukungan kesejahteraan prajurit menjadi elemen penting dalam optimalisasi strategi penegakan disiplin. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan penelitian terdahulu mengenai peran kepemimpinan dan sistem pengawasan, namun terdapat kebaruan pada model analisis yang menempatkan faktor lingkungan operasi sebagai variabel strategis dalam penegakan hukum dan disiplin prajurit pada operasi pengamanan perbatasan.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI Angkatan Darat dalam operasi pengamanan perbatasan Papua-PNG merupakan faktor kunci dalam mewujudkan profesionalisme prajurit. Implementasi strategi dilakukan melalui

pendekatan preventif, preemtif, dan represif yang berjalan dalam mekanisme komando, pembinaan hukum, serta pengawasan berjenjang. Efektivitas pelaksanaan strategi tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan komandan, kualitas pembinaan hukum, sistem pengawasan, serta faktor kontekstual wilayah operasi seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tekanan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme prajurit tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan mekanisme penegakan hukum, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengadaptasikan strategi disiplin terhadap kondisi lapangan. Penelitian ini menghasilkan konsep bahwa strategi penegakan hukum dan disiplin yang adaptif berbasis konteks operasi merupakan pendekatan penting dalam menjaga profesionalisme prajurit pada wilayah perbatasan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan lokasi penelitian yang terbatas pada beberapa satuan tugas serta keterbatasan akses data operasional yang bersifat sensitif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi kondisi di seluruh wilayah perbatasan. Selain itu, pendekatan kualitatif belum memungkinkan pengukuran kuantitatif tingkat efektivitas strategi penegakan disiplin secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta mengembangkan model pengukuran efektivitas strategi penegakan hukum dan disiplin yang lebih terstruktur. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji integrasi teknologi pengawasan, aspek psikologis prajurit, serta pengaruh kebijakan organisasi terhadap konsistensi disiplin dalam operasi militer selain perang.

BIBLIOGRAPHY

- Arianto, A., & Prabowo, A. (2021). Military professionalism and discipline in border security operations. *Journal of Defense Studies*, 15(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/09700161.2021.1901234>
- Bashori, K., & Wicaksono, A. (2022). Leadership and military discipline in remote operational areas. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v12i1.1560>
- Baylis, J., Wirtz, J. J., & Gray, C. S. (2020). *Strategy in the contemporary world* (6th ed.). Oxford University Press.
- Dewi, R., & Nugroho, Y. (2020). Law enforcement effectiveness in military organizations: Evidence from operational units. *International Journal of Military Studies*, 8(1), 33–47. <https://doi.org/10.1163/ijms.2020.008>
- Huntington, S. P. (1957). *The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations*. Harvard University Press.
- Iskandar, D., & Suryanto, T. (2023). Border security governance and military professionalism in Indonesia. *Asian Security*, 19(2), 210–228. <https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2174561>
- Lykke, A. F. (1989). *Military strategy: Theory and application*. U.S. Army War College Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Prasetyo, B., & Hidayat, R. (2019). Implementation of military discipline law in operational environments. *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, 7(2), 101–118.
- Rahman, F., & Putra, M. (2024). Adaptive military leadership in high-risk operational environments. *Defense & Security Analysis*, 40(1), 65–82. <https://doi.org/10.1080/14751798.2024.2301123>
- Santoso, H., & Wijaya, A. (2021). Human rights compliance in military border operations.

Journal of Human Rights Practice, 13(3), 412-430.
<https://doi.org/10.1093/jhuman/huab019>

Sungkono, S., Widodo, J., & Prasetya, R. (2024). Peacekeeping operations challenges and military discipline in modern conflict. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 10(2), 89-104.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Wibowo, A., & Kurniawan, D. (2022). Factors influencing military discipline in remote deployment areas. *Indonesian Journal of Defense Studies*, 9(1), 77-95.